

KETERLIBATAN PELAKU UMKM BINAAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MEDAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E- KATALOG LOKAL

Hajrah Rahmah¹, Suhairi²

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi: Hajrahrahma2002@gmail.com¹, Suhairi@uinsu.ac.id²

Abstrak

Artikel ini ditulis sebagai laporan praktek kerja lapangan mahasiswa, namun juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk menganalisis penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan untuk mengetahui dampak penggunaan e-katalog terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di bawah binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Manajemen pemerintahan menjadi semakin penting karena ekonomi Indonesia terus berkembang dengan cepat dan otonomi daerah terus berkembang. Teknik penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pemerintah mungkin perlu menciptakan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan publik. Dengan mempersingkat prosedur dan waktu yang dibutuhkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, penggunaan katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah akan meningkatkan keterbukaan, transparansi, dan efisiensi. Sektor UMKM terkena dampak dari penggunaan e-katalog dalam pembelian produk dan jasa pemerintah karena masih ada sejumlah pemilik usaha kecil yang terlibat dalam rantai pasokan. Peran penyedia layanan kecil yang telah menjadi bagian dari rantai distribusi dihilangkan oleh e-katalog, yang memutus mata rantai tersebut. Pemerintah telah mendorong UMKM untuk menggunakan sistem e-katalog, salah satunya dengan memasukkan mereka ke dalam e-katalog produk lokal. Fakta bahwa UMKM tidak menggunakan sistem e-katalog dalam praktiknya merupakan tanda bahwa teknologi ini masih kurang dimanfaatkan, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa mereka kekurangan sumber daya dan pengetahuan yang diperlukan untuk memanfaatkannya.

Kata kunci : e katalog; UMKM; pengadaan barang/jasa

Abstract

This article was written to serve as a student fieldwork practice report, but it also has other objectives, including to analyze the use of e-catalogs in the procurement of government goods and services and to ascertain the impact of such use on Micro, Small and Medium Sized Enterprises (MSMEs) under the direction of the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade of Medan Cit. Government management is becoming more and more necessary as Indonesia's economy continues to expand quickly and regional autonomy continues to grow. The research technique employed is normative juridical. The government may need to create facilities and infrastructure in order to provide public services. By shortening the procedure and time involved in procuring government goods and services, the use of an electronic catalog in government procurement will increase openness, transparency, and efficiency. The MSME sector is impacted by the use of the e-catalog in government purchases of products and services since there are still a number of small business owners who are involved in the supply chain. The role of minor service providers who had been a part of the distribution chain is eliminated by the e-catalog, which breaks the link. The government has promoted MSMEs' use of the e-catalog system, one of which is their inclusion in the e-catalog of local products. The fact that MSMEs don't use the e-catalogue system in practice is a sign that this technology is still underutilized, as indicated by the fact that they lack the resources and knowledge necessary to make use of it.

Keywords: e catalog; MSME; procurement of goods/services

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan kegiatan praktik lapangan Mahasiswa dituntut untuk membuat sebuah laporan dalam bentuk artikel. Selain itu lembaga mengharapkan dengan adanya praktek lapangan seperti itu akan meningkatkan keterampilan juga pengalaman Mahasiswa dalam melaksanakan praktek kerja lapangan yang kelak akan menjadi bekal bagi para Mahasiswa yang nantinya akan terjun langsung ke dunia kerja.

Untuk lokasi praktik lapangan sendiri saya memilih Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan perdagangan Kota Medan dan membahas permasalahan mengenai keterlibatan pelaku UMKM dalam pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog. Saya mengangkat masalah tersebut karena saya

melihat bahwasanya Setiap Instansi maupun Badan Pemerintahan yang ada di Kota Medan dalam melaksanakan suatu kegiatan harus melibatkan UMKM agar UMKM yang ada di Kota Medan bisa terus berkembang dan maju karena akan mendapatkan lahan pemasaran yang lebih luas yaitu di bidang pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota Medan .

Langkah penting dalam mengenali kemajuan adalah akuisisi pemerintah terhadap tenaga kerja dan produk. Menurut berbagai perspektif, kegiatan ini tidak dapat dipisahkan dari kemajuan Indonesia. Melalui komponen pengadaan tenaga kerja dan barang oleh pemerintah, kemajuan perkantoran dan yayasan untuk mendukung pembangunan moneter diakui di sektor keuangan. Di bidang sosial, pengadaan tenaga kerja dan barang pemerintah untuk memajukan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan juga dapat mengatasi masalah sosial tertentu. Kebutuhan untuk administrasi otoritas publik telah meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat dan perluasan kemandirian provinsi. Kebutuhan administrasi yang berwujud dan tidak berwujud mungkin ada. Untuk memenuhi kebutuhan ini, barang dan jasa harus dibeli.

Menurut informasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM, terdapat 64.194.057 perusahaan UMKM pada tahun 2018 (99,9%), dan secara keseluruhan terdapat 116.978.631 orang yang dipekerjakan. Perusahaan besar berjumlah 5.550 unit (0,01%), dan ada 3.619.507 orang yang dipekerjakan secara keseluruhan. Kesimpulan yang dapat diambil dari data ini adalah bahwa meskipun pengusaha besar terus mendominasi dalam hal jumlah uang, aset, dan pertumbuhan bisnis, sektor UMKM terus memimpin dalam hal jumlah dan penyerapan tenaga kerja.

Pengenalan pengadaan katalog elektronik untuk produk dan jasa oleh pemerintah berdampak pada Usaha Kecil dan Mikro Menengah (UMKM). Para pemasok barang dan jasa pemerintah, yang mayoritas adalah UMKM, mengalami penurunan penjualan atau bahkan gulung tikar akibat ketidakmampuan mereka untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dalam pelaksanaan e-katalog ini. Penting untuk mempertimbangkan model kemitraan yang digunakan untuk melaksanakan e-katalog dengan melibatkan UMKM, atau usaha kecil dan menengah, di daerah. Mengingat bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana e-katalog digunakan untuk mendapatkan produk dan jasa bagi pemerintah dan untuk melihat bagaimana hal tersebut mempengaruhi UMKM.

Sebelum ada kebijakan ini biasanya instansi maupun badan Pemerintahan yang ada di Kota Medan dalam melaksanakan suatu kegiatan biasanya untuk memenuhi kebutuhan suatu kegiatan tersebut baik berupa makanan, minuman, maupun alat alat lain yang di perlukan masih membelinya di suatu toko besar maupun rumah makan terkenal hal tersebut sangat di sayangkan karena sektor ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan UMKM yang pada nantinya akan berujung akan meningkatkan prekonomian yang ada di Kota Medan.

Selain itu permasalahan lain yang muncul adalah karena kebijakan Walikota Medan yang mewajibkan dalam pemenuhan kebutuhan di suatu Instasi maupun Badan yang ada di Kota Medan harus melalui E-Katalog masi banyak para pelaku UMKM yang belum mendaftarkan produknya ke UMKM karena beberapa Faktor. Faktor pertama adalah karena tidak tahu caramendaftarkannya, faktor kedua adalah karena terjadi kendala di NIB, dan yang terakhir adalah masi seringnya terjadi bug yang mempersulit proses pendaftaran produk ke E-Katalog.

Terkait hal di atas, dalam pelaksanaan Praktek Lapangan mahasiswa tahun 2023 yang akan penulis laksanakan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Penulis akan ikut serta dalam sosialisasi dan juga pemaksimalan penggunaan E-Katalog dalam keterlibatan Pelaku UMKM dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk sosialisasinya akan di lakukan dalam bentuk meeting yang akan di bimbing langsung oleh bapak Anwar selaku Kepala Bagian UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan .

Oleh karena itu, penulis mengambil judul “KETERLIBATAN PELAKU UMKM BINAAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MEDAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E-KATALOG LOKAL” yang akan dijadikan sebagai bahan artikel Praktek Lapangan saya.

METODE

Penelitian, menurut Soeryono Soekanto, adalah suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu prosedur untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang baik. Untuk metodologi penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif.

Penyusun menggunakan berbagai metodologi yang ada sebagai acuan dalam melakukan penelitian agar penelitian ini dapat memenuhi tujuannya dengan tetap mengacu pada kriteria ilmiah sebuah kegiatan penelitian. Berikut ini adalah beberapa contoh pendekatan yang penyusun gunakan:

1. Jenis Penelitian

Penulis menyelidiki secara menyeluruh asas-asas dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan topik dalam penelitian hukum normatif ini. Dalam penelitian hukum ini, penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mencari, mengevaluasi, dan menganalisis data sekunder (buku-buku) yang terkait dengan materi penelitian. Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi cara-cara normatif dari sumber-sumber yang tercatat dan data-data dari bank dalam perjanjian kredit, maka pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama.

2. Jenis Data

Data sekunder adalah jenis informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber-sumber hukum, termasuk bahan hukum primer dan sekunder, membentuk data sekunder. Dalam penelitian, ada dua jenis sumber data: data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat, dan data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari bahan pustaka.

3. Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dengan cara menelaah sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

4. Alat Pengumpulan Data

Melakukan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dalam penelitian hukum normatif. Melakukan studi dokumen untuk mendapatkan gambaran yang luas mengenai isu-isu yang terkait dengan masalah yang diteliti merupakan salah satu strategi pengumpulan data

yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

5. Analisis Data

Informasi yang diperoleh dari tinjauan literatur kemudian diperiksa secara kualitatif. Informasi yang dikumpulkan kemudian diorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok dan dikategorikan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pencarian yang representatif dan relevan yang terkait dengan masalah tersebut. Setelah penyelidikan dan analisis menyeluruh, kesimpulan diambil yang harus menjawab masalah yang diangkat.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E Katalog

Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, dan data lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa, sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik. Katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal adalah jenis-jenis katalog elektronik. Sebuah produk, proyek konstruksi, atau layanan lainnya termasuk dalam katalog elektronik.

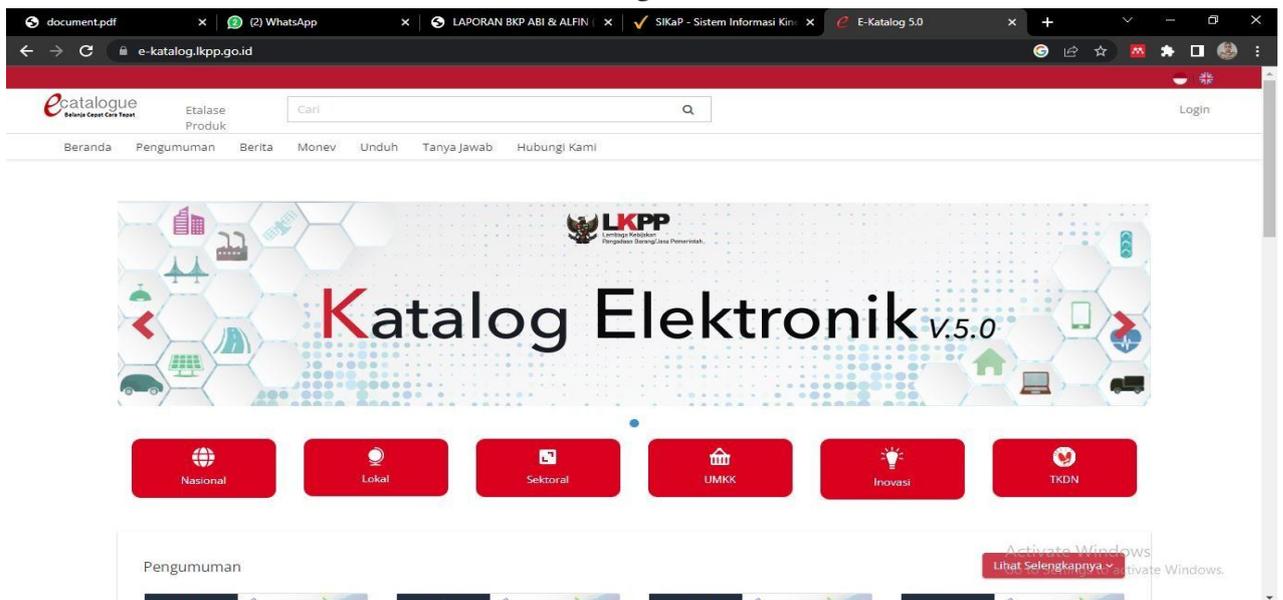
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengkoordinasikan dan menciptakan sistem e-katalog, dan e-purchasing adalah proses pembelian produk dan jasa melalui sistem tersebut. Pengadaan secara elektronik, terkadang dikenal sebagai e-procurement, mencakup e-katalog dan e-pembelian. Dengan adanya sistem e-katalog, seluruh instansi, kementerian, lembaga, dan organisasi perangkat daerah (OPD) dapat langsung menggunakan sistem ini dengan prosedur e-purchasing, tanpa harus melalui proses lelang saat melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

Selain itu menurut UKPPB Kota Medan selama tahun 2022 sudah ada beberapa jenis barang yang di sediakan oleh pelaku UMKM sendidri contohnya adalah makanan dan minuman, ATK, dan pakaian dinas . Untk jumlah pemesanan makanan dan minuman yang sudah di pesan oleh OPD maupun instansi pemerintahan Kota Medan melalui E-Katalog berjumlah 810 pesanan dan memiliki nilai total sejumlah Rp. 26 Miliar . Selanjutnya untuk jumlah pemesanan

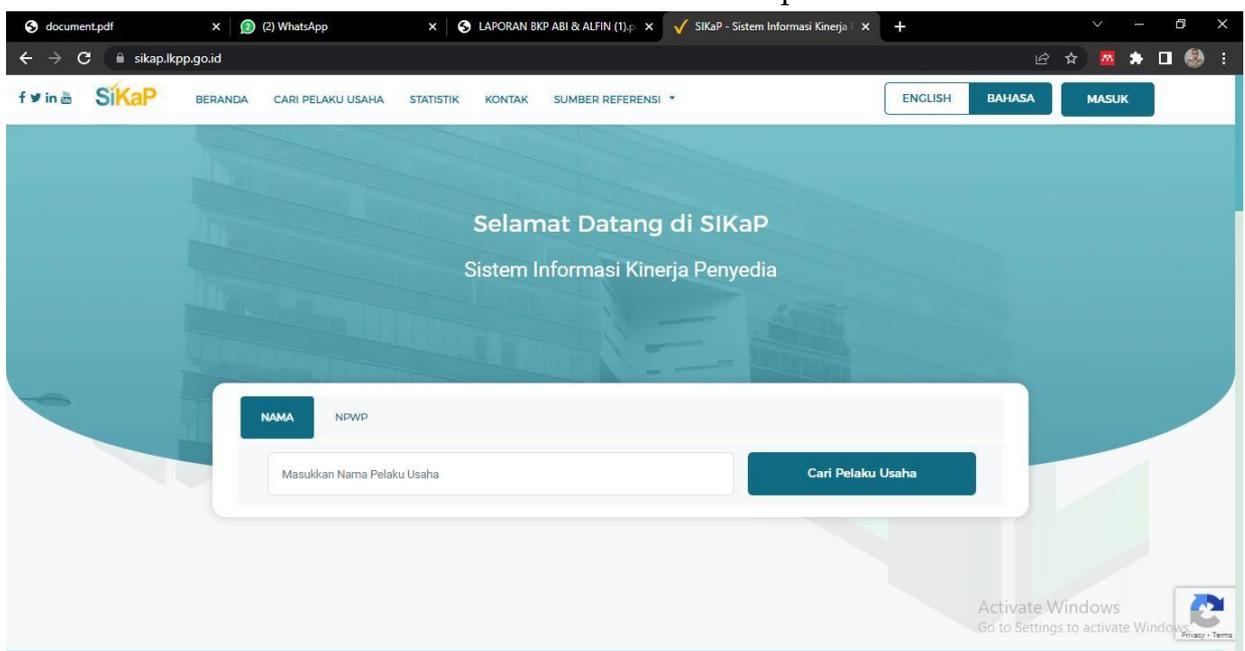
ATK berjumlah 734 pesanan dan memiliki nilai total sejumlah Rp 137 Juta . Dan yang terakhir yaitu pakaian dinas berjumlah 50 pesanan dan memiliki nilai total sejumlah Rp 54 Juta.

Berikut adalah gambar website dari E-Katalog dan Sikap

Gambar
r 1 Website
E-Katalog



Gambar 2 Website Sikap



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan langkah-langkah berikut saat melakukan pemesanan barang atau jasa: Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemesanan dengan cara masuk ke aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), kemudian PPK melakukan pembelian barang atau jasa yang diperlukan melalui aplikasi e-purchasing, yang disesuaikan dengan harga, spesifikasi teknis, dan harga yang dibutuhkan disesuaikan dengan data barang yang tertera di dalam e-katalog. Nama paket pekerjaan pengadaan yang sudah masuk dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).

PPK mengirimkan permintaan pembelian barang atau jasa kepada penyedia barang atau jasa yang tercantum dalam e-katalog setelah memilih jenis produk pesanan yang dibutuhkan dan sesuai dengan spesifikasi dan harga yang diminta. Anda memiliki pilihan untuk melakukan negosiasi harga untuk permintaan pembelian online ini atau tidak.

Selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah tanggal pemesanan barang atau jasa, penyedia barang atau jasa akan melihat permintaan pembelian dan kemudian menyetujuinya. Pada paket pembelian secara otomatis akan terdapat notifikasi bahwa penyedia barang atau jasa telah menyetujui pembelian barang atau jasa yang diminta. Melalui aplikasi e-purchasing, PPK atau pejabat pengadaan mengajukan permintaan pembelian barang atau jasa yang telah diotorisasi oleh penyedia. PPK/Pejabat Pengadaan menggunakan sistem e-katalog untuk mengirimkan surat pesanan pembelian produk atau jasa kepada penyedia. Setelah PPK/Pejabat Pengadaan dan penyedia menyetujui permintaan pembelian tersebut, maka dilakukan perjanjian pembelian.

Di wilayah Jabodetabek, penyedia jasa mengirimkan barang selambat-lambatnya lima hari kerja setelah tanggal transaksi, dan selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah tanggal transaksi untuk lokasi di luar Jabodetabek.

Melalui aplikasi e-purchasing, penyedia barang menginformasikan kepada PPK mengenai status pengiriman barang. Kecuali dinyatakan lain dalam surat perjanjian, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) menerima dan memeriksa barang yang disediakan oleh penyedia barang sesuai dengan surat pesanan selambat-lambatnya lima hari kerja setelah barang diterima pembeli.

PPHP wajib memberitahukan kepada PPK mengenai kerusakan atau penyimpangan spesifikasi barang jika ditemukan. Dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BPHP) kepada penyedia selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah tanggal penerimaan barang, PPK membuat permintaan penggantian berdasarkan pemberitahuan tersebut. Apabila ternyata barang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan, penggantian barang dapat dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani. Setelah BAST ditandatangani, penggantian barang harus dilakukan selambat-lambatnya empat belas hari kerja. Setelah pekerjaan selesai, PPK memberitahukan kepada penyedia barang melalui aplikasi e-purchasing bahwa barang telah diterima.

Apabila barang telah sesuai dengan persyaratan barang yang dipesan dan ditandai dengan ditandatanganinya BAST oleh PPHP dan penyedia barang, maka pembayaran dilakukan setelah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerima barang. Untuk melunasi tagihan atas pembelian barang tersebut, penyedia barang menerbitkan kuitansi atau bukti pembayaran atas pembelian barang atas nama dan ditujukan kepada PPK. Kwitansi dipindai dan dikirim ke aplikasi untuk pembelian secara elektronik. Setelah menetapkan bahwa dokumen pembayaran telah akurat dan lengkap, PPK melakukan pembayaran selambat-lambatnya lima belas hari kerja. PPK melakukan update pada aplikasi e-purchasing dengan status barang yang telah diterima. Aplikasi e-purchasing digunakan oleh PPK untuk menginput informasi pembayaran.

Apabila barang telah sesuai dengan persyaratan barang yang dipesan dan ditandai dengan ditandatanganinya BAST oleh PPHP dan penyedia barang, maka pembayaran dilakukan setelah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerima barang. Untuk melunasi tagihan atas pembelian barang tersebut, penyedia barang menerbitkan kuitansi atau bukti pembayaran atas pembelian barang atas nama dan ditujukan kepada PPK. Kwitansi dipindai dan dikirim ke aplikasi untuk pembelian secara elektronik. Setelah menetapkan bahwa dokumen pembayaran telah akurat dan lengkap, PPK melakukan pembayaran selambat-lambatnya lima belas hari kerja. PPK melakukan update pada aplikasi pembelian elektronik dengan status barang yang diterima. PPK memasukkan informasi pembayaran ke dalam aplikasi belanja online.

Dengan mengurangi prosedur dan waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan produk dan layanan pemerintah, penggunaan katalog elektronik akan membuat proses ini menjadi lebih terbuka, transparan, dan efektif. Sebagai contoh, fasilitas kesehatan milik pemerintah dapat dengan cepat dan efektif membeli obat-obatan, persediaan medis habis pakai, dan peralatan medis melalui katalog elektronik. Dengan adanya sistem e-katalog, korupsi dan anomali yang melanda pelaksanaan pengadaan alat kesehatan melalui lelang di masa lalu dapat dihilangkan.

2. Peran dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dalam membina pelaku UMKM untuk mendaftarkan ke E-Katalog

Untuk meningkatkan peran UMKM di Kota Medan dalam memenuhi kebutuhan barang untuk OPD dan juga instansi pemerintahan yang ada di Kota Medan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan melakukan beberapa kegiatan guna memastikan bahwa para pelaku UMKM sudah dapat melaksanakan langkah langkah untuk mendaftarkan produk mereka ke website E-Katalog. Salah satu kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan adalah melakukan sosialisasi kepada 5 pelaku UMKM yang dilaksanakan di ruang rapat yang ada di kantor .

Gambar 3

Sosialisasi E-Katalog Oleh Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan



Kegiatan di atas adalah kegiatan bimbingan serta sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan untuk memastikan para pelaku UMKM di Kota Medan sudah memahami dan dapat melaksanakan pelepasan barang untuk OPD dan juga instansi melalui E- Katalog. Kegiatan tersebut juga di ikuti oleh UKPPB Kota Medan dan juga LKPP Pusat yang bertugas sebagai pemateri yang memberikan materi mengenai bagaimana pelaku UMKM dapat mendaftarkan barang nya di website E-Katalog.

Pada sosialisasi tersebut para pelaku UMKM di berikan langkah langkah untuk dapat mendaftarkan barangnya ke E-Katalog. Untuk proses pertama para pelaku UMKM harus membuat akun pada website Sikap.lkpp.go.id selanjutnya mereka harus mengisi data data berikut:

1. NIB beserta lampiran
2. Scan NPWP
3. Scan Akta Pendirian
4. Screenshot lampiran ridak tercantum
5. Surat pernyataan UMUM
6. Foto produk

7. Wilayah jual produSetelah mengisi semua data di atas selanjutnya para pelaku UMKM bisa memasukkan akun yang sudah didaftarkan di SIKAP ke website E-Katalog dan selanjutnya para pelaku UMKM bisa mengisi data data selanjutnya mulai dari jenis barang yang akan dipasarkan ,detail-detail barang tersebut, foto barang ,dan juga harga barang. Untuk harga barang sendiri memiliki ketentuan tersendiri yaitu tidak bole melebihi harga yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. Setelah mengisis semua data diatas selanjutnya memilih lamanya produk tersebut akan di tayang kan di E-Katalog.

Setelah itu jika suatu barang tersebut sudah dipesan oleh OPD atau Instansi pemerintahan yang ada di Kota Medan notifikasinya akan langsung masuk di website E-katalog tersebut . Itulah yang masi menjadi kelemahan ,jadi para pelaku UMKM harus rutin mengecek wesite E-Katalog agar pesanannya tidak terlalu lama sehingga bisa segera diproses dan dikirimkan ke kantor dari OPD atau Instansi yang membutuhkan. Selain itu salah satu kelemahan lain untuk pengaksesan E-katalog ini belum bisa dilakukan melalui hp android tetapi masi harus mengguakan laptop maupun komputer.

KESIMPULAN

Dengan mempersingkat prosedur dan waktu dalam pembelian produk dan layanan pemerintah, penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis katalog elektronik akan menjadi lebih terbuka, transparan, dan efektif. Sebagai contoh, fasilitas kesehatan milik pemerintah yang melakukan pembelian melalui katalog elektronik dapat dengan cepat dan efektif mendapatkan makanan, alat tulis, pakaian dinas, obat-obatan, bahan medis habis pakai, dan peralatan medis. Jika di masa lalu banyak terjadi korupsi dan anomali saat pengadaan alat kesehatan melalui lelang, hal ini dapat dicegah dengan menggunakan sistem e-katalog.

Sektor UMKM terkena dampak dari penggunaan e-katalog dalam pengadaan produk dan jasa pemerintah, meskipun masih ada beberapa pemilik usaha kecil yang telah terlibat dalam rantai pasokan. Penyedia jasa kecil yang tadinya menjadi bagian dari rantai distribusi tidak lagi diperlukan berkat e-katalog yang memutus mata rantai tersebut. Dengan adanya sistem e-katalog, penyedia jasa kecil atau UMKM yang selama ini hanya berperan sebagai rantai distribusi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah akan musnah. Keterlibatan UMKM dalam e-katalog produk lokal merupakan salah satu cara pemerintah mendorong UMKM untuk menggunakan sistem e-katalog. Karena kurangnya dana dan pengetahuan tentang cara menggunakan sistem e-katalog, UMKM tidak sering menggunakannya ketika membeli produk dan jasa dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem e-katalog masih kurang dimanfaatkan oleh UMKM.

Jadi dengan adanya proses pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog ini dapat meminimalisir terjadinya praktek KKN sehingga akan terciptanya sistem pemerintahan yang lebih bersih dan jujur juga lebih bermanfaat lagi kepada rakyat melalui pengikutsertaan para pelaku UMKM dalam pengadaan barang dan jasa yang ada di OPD maupun instansi pemerintahan. Dengan dilibatkannya para pelaku UMKM akan meningkatkan perekonomian yang ada disuatu daerah terutama di Kota Medan mengingat UMKM merupakan tulang punggung perekonomian yang ada disuatu provinsi .

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal Adnan Husada Putra, "Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora", Jurnal Analisa Sosiologi Vol 5 No 2 Oktober 2016, Universitas Sebelas Maret, 2016, Surakarta, hal 44. DOI: <https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162>
- Amelia Iftitah Damayanti, Tjahjanulin Domai, Abdul Wachid, "Penerapan EProcurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2, Universitas Brawijaya, 2013, Malang.
- Nuryanti, "Peran E-Commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)", Jurnal Ekonomi Volume 21, Nomor 4 Desember 2013, Universitas Riau, 2013, Pekanbaru.
- Nuryanti, "Peran E-Commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)", Jurnal Ekonomi Volume 21, Nomor 4 Desember 2013, Universitas Riau, 2013, Pekanbaru.
- Rio Pinondang Hasibuan, "Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Pekanbaru Tahun 2014", Jurnal Online Mahasiswa (JOM) JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasRiau, 2016, Pekanbaru.
- Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa", Jurnal Riset ekonomi Pembangunan (REP) Vol 4 No 1, Universitas Tidar, 2019, Magelang
- William Christiawan "Analisa Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di Provinsi Banten Dan Kota Tangerang Selatan", Jurnal Akuntansi Vol 2 No 3 Universitas Syarif Hidayatullah, 2018.

Internet

<https://www.diskopumkm.pemkomedan.go.id/>

<https://analisadaily.com/berita/arsip/2017/10/28/440900/penerapan-e-katalog-berdampak-pada-pelaku-usaha/>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2012/03/28/11093274/Tiga.Hal.yang.Buat.UMKM.Tahan.Krisi>